

BAB III

PERUBAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARK GEUN HYE MENGENAI REUNIFIKASI KOREA

Park Geun-hye adalah Presiden Korea Selatan ke-11 yang terpilih pada tanggal 19 Desember 2012 sebagai wanita pertama yang memegang posisi tertinggi dalam sejarah Korea Selatan. Selama kepemimpinannya dari awal 2013 sampai awal 2017, Presiden Park turut membentuk kebijakan-kebijakan mengenai reunifikasi dan upaya memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Namun, apa yang menjadi harapan maupun tujuan awal kebijakan reunifikasi Park Geun Hye berbeda dengan implementasinya. Berikut perubahan implementasi kebijakan-kebijakan Park Geun Hye yang berkaitan dengan hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara dalam pembentukan reunifikasi.

A. Trust-Building Process

Park Geun Hye sebagai presiden Korea Selatan ini menjanjikan untuk memperkuat ekonomi, memperbaiki keamanan sosial, dan meningkatkan hubungan dengan Korea Utara. Presiden Park berusaha untuk berkampanye mengambil pendekatan yang lebih pragmatis ke Korea Utara, didasarkan pada pembangunan kepercayaan melalui dialog baru sambil menanggapi dengan tegas setiap provokasi baru. Presiden Park juga berjanji untuk membangun lembaga multilateral sebagai wadah kerjasama regional yang akan mencakup Korea Utara.¹

¹ Daniel, W. (2017). Inter-Korean Relations. *The National Committee on North Korea*, 1-13.

Sebagai bagian dari kebijakan Korea Selatan tentang Korea Utara dan reunifikasi, pemerintah Park Geun Hye mempresentasikan *Trust-Building Process* atau proses pengembangan kepercayaan di Semenanjung Korea. Alasannya karena untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Kim Dae Jung, kebijakan *Trust-Building Process* berusaha meningkatkan dan memperbaiki hubungan antar-Korea demi terciptanya reunifikasi. Membangun fondasi untuk reunifikasi nasional ditetapkan sebagai salah satu dari empat tujuan utama pemerintah Park Geun Hye dan secara eksplisit menjadikan kebijakan reunifikasi sebagai tugas negara yang penting.

Membangun fondasi untuk reunifikasi nasional pertama kali disebutkan dalam pernyataan Presiden Park Geun Hye tentang metode untuk membangun dasar bagi reunifikasi secara damai pada tanggal 15 Agustus 1980.² Kekuasaan Korea Selatan dan status internasional pada awal 1970 sangat berbeda dengan tahun 2010-an. Namun, di tengah rasa ketidakpercayaan maupun konfrontasi dan ketegangan yang terjadi dalam hubungan antar-Korea, hal ini telah menunjukkan adanya banyak kemauan politik untuk memperluas kebijakan Korea Utara. Terutama kebijakan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan antar-Korea menjadi sebuah kebijakan reunifikasi yang digunakan untuk membangun fondasi bagi reunifikasi Korea.

Kebijakan Park Geun Hye dipresentasikan dalam sebuah artikel *Foreign Affairs* sebagai "*trustpolitik*." Artikel tersebut meminta Korea Utara untuk mengadakan kesepakatan dengan Korea Selatan maupun masyarakat internasional dan menjamin suatu konsekuensi yang meyakinkan atas segala tindakan yang melanggar perdamaian. Strategi tersebut pada dasarnya meminta

² Young, H. P. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference. Seoul.

Korea Utara untuk menunjukkan dirinya dapat dipercaya di mata masyarakat internasional sebagai prasyarat penting untuk membangun hubungan yang positif. Selain itu, Park menekankan pentingnya “penyelarasan” upaya semenanjung Korea dan internasional terhadap Korea Utara. Untuk memastikan stabilitas, *Trust-Building Process* harus diterapkan secara konsisten dari satu isu ke isu lainnya berdasarkan tindakan yang dapat diverifikasi, serta tidak boleh mengambil langkah-langkah hanya karena kebijakan politik.

Namun, pada tahun 2014, Park Geun Hye mulai mengambil kebijakan ini menuju arah yang berbeda dengan semakin menekan reunifikasi sebagai bagian utama dari kebijakan antar Korea-nya. Dalam pidato Tahun Barunya di tahun 2014 tersebut, Park Geun Hye mengatakan bahwa "reunifikasi adalah jackpot."³ Park Geun Hye memaparkan visi jangka panjangnya lebih lanjut untuk menciptakan integrasi kedua Korea dalam pidatonya di Dresden pada Maret 2014, dengan mempresentasikan proses integrasi antar Korea secara bertahap yang melibatkan kerjasama kemanusiaan, menciptakan kemakmuran bersama melalui pembangunan infrastruktur. yang mendukung penghidupan rakyat, dan akhirnya membentuk integrasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, perluasan kerjasama antar-Korea untuk proyek-proyek ekonomi berskala besar dikondisikan pada denuklirisasi Korea Utara.⁴ Dalam pidato tersebut, Park Geun Hye juga berfokus untuk menyerukan penigkatan pertukaran antar Korea dan terus mengulangi tema reunifikasi. Media Korea Utara mengkritik penekanan pada reunifikasi ini dengan menafsirkannya sebagai asumsi akan keruntuhan Korea

³ Daeniel, W. Op.cit., hlm. 6

⁴ Scott, S. (2016). South Korean Identity Under Park Geun-hye: Crosscurrents & Choppy Waters. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, 104-112.

Utara dan menciptakan reunifikasi yang dilakukan oleh pimpinan Korea Selatan melalui penyerapan.

Dalam konteks lingkungan strategis di Semenanjung Korea yang membutuhkan keseimbangan dan kehati-hatian dalam menjaga keamanan nasional serta menghilangkan ketidakpercayaan dalam kerjasama, kebijakan *trustpolitik* dibatasi oleh pilihan terbatas untuk mengatasi dilema dalam menangani nuklir Korea Utara ketika mencoba membangun kepercayaan antar-Korea. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan ini justru beroperasi atas dasar timbal balik dan kekakuan prinsip, di mana kepercayaan justru tidak ada dan tidak didefinisikan secara jelas. Kerjasama Korea Utara-Selatan di bawah *trustpolitik* tidak bergantung pada landasan kepercayaan, tetapi sebaliknya dilandasi oleh hubungan yang bergantung pada keyakinan dan permintaan tindakan timbal balik atas harapan positif.⁵ Berdasarkan prinsip-prinsip kuat yang bertujuan untuk membangun konsiliasi antar-Korea, Park Geun Hye perlu terlebih dahulu membangun konsep kepercayaan untuk meningkatkan kerjasama antara Seoul dan Pyongyang serta membangun landasan bagi reunifikasi Korea.

Reunifikasi selalu menjadi isu yang kuat dalam hubungan antar-Korea sebagai ungkapan identitas etnik bersama untuk mengakhiri penderitaan akibat tragedi perpecahan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat nasional. Namun, pembahasan reunifikasi dari yang terutama berfokus pada biaya, jadwal yang ditangguhkan, dan proses kooperatif di bawah presiden Korea Selatan yang progresif, kemudian berubah di bawah kepemimpinan Park Geun Hye menjadi satu hal yang berfokus pada pemanfaatan reunifikasi yang secara implisit dapat dihasilkan dari kerentanan Korea Utara.

⁵ Nayoung, S. K. (2014). Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations. *Issues and Insights*.

Fokus pada manfaat dari proses reunifikasi telah menggeser kerangka prospek reunifikasi.

Terlepas dari penekanan retorik pada reunifikasi "bonanza," Park Geun Hye membentuk Komite Kepresidenan tentang Persiapan untuk Reunifikasi, yaitu sebuah komite yang diketuai oleh Park Geun Hye itu sendiri untuk mempersiapkan implikasi keamanan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial dari reunifikasi. Dalam menghadirkan reunifikasi sebagai kesempatan yang membutuhkan persiapan aktif, Park Geun Hye menawarkan pandangan reunifikasi sebagai keuntungan dan pemenuhan takdir nasional Korea dan bukan sebagai komponen dari persaingan ideologis yang sudah berlangsung lama antara kedua Korea. Namun, pandangan ini kurang mendapat dukungan dari publik karena komite tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses atau kekuatan pendorong yang akan menciptakan reunifikasi.

Sebuah laporan *Asan Institute for Policy Studies* yang dirilis pada tahun 2015 mengilustrasikan bahwa sejumlah besar masyarakat Korea mendukung upaya untuk mencapai dialog dan kerja sama serta memandang kebijakan Park Geun Hye sebagai kurangnya kemajuan dalam usahanya untuk terlibat dengan Korea Utara. Laporan tersebut mencatat penurunan dari 59% orang Korea yang menaruh perhatian pada etnis bersama sebagai motivasi untuk reunifikasi di tahun 2007 menjadi 40% pada tahun 2014.⁶ Generasi yang lebih muda menilai pentingnya etnis bersama jauh lebih rendah daripada senior mereka. Hal ini menjadi penting karena generasi muda justru cenderung menanggapi alasan ekonomi untuk mengejar penyatuan daripada yang didasarkan pada etnis bersama.

⁶ Scott, S, Op.cit., hlm. 106

Data ini menunjukkan kemunduran anti-komunisme sebagai komponen utama dalam melawan identitas Korea Utara. Prospek terbaik untuk membangun landasan pemikiran jangka panjang dalam mendukung reunifikasi akan menghadirkan reunifikasi yang bermanfaat bagi kepentingan ekonomi kedua Korea. Sebaliknya, hasil survei menyiratkan bahwa kesenjangan ekonomi antara kedua Korea bisa menjadi faktor utama melemahnya dukungan publik bagi reunifikasi Korea jika tidak ditangani dengan terampil. Dengan mengubah diskusi identitas Korea Selatan terkait reunifikasi dari yang mengandalkan persaingan berbasis ideologi menjadi ketinggalan zaman untuk legitimasi ke sebuah narasi untuk mengantisipasi manfaat ekonomi dan kemakmuran bersama, Park Geun Hye telah mengambil langkah maju dalam mengembalikan identitas pada isu reunifikasi.

B. Penutupan KIC (*Kaesong Industrial Complex*)

1. Pengertian Kawasan Industri Kaesong

Kawasan Industri Kaesong adalah sebuah kawasan industri yang terletak di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korea Utara) tepat di seberang zona demiliterisasi Korea Selatan. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2004 dan sebagian besar dibiayai oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama. KIC adalah salah satu poin penting dari perjanjian damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan sering dipandang sebagai indikator hubungan di antara keduanya.⁷

Korea Selatan mengatakan tujuan KIC adalah untuk mengembangkan sebuah industri di mana perusahaan Korea Selatan dapat memproduksi produk

⁷ BBC. (2016, Februari 10). *What is the Kaesong Industrial Complex?* Retrieved Maret 22, 2018, from BBC News: <http://www.bbc.com/news/business-22011178>

mereka menggunakan tenaga kerja Korea Utara. Ia berpendapat bahwa akan membantu Korea Utara dalam memulai reformasi ekonominya dan meredakan ketegangan antara kedua Korea. Hal itu juga dilihat sebagai cara untuk mendorong perusahaan agar menjaga produksi lokal dari pengeksporan ke Tiongkok atau negara-negara lainnya dengan upah rendah. Meskipun merupakan usaha swasta yang dijalankan oleh Hyundai Asan, bagian dari Grup Hyundai, dan Korea Land Corporation (juga perusahaan Korea Selatan), kedua pemerintah terlibat dalam inisiatif ini. Semua barang yang dibuat di sana diekspor ke Korea Selatan untuk dijual. KIC adalah zona bebas bea, dan tidak ada pembatasan pada penggunaan mata uang asing atau kartu kredit. Tidak ada visa yang diperlukan untuk memasuki kawasan.

Pembentukan kawasan industri Kaesong dimulai saat Korea Utara menerima proposal kesepakatan tersebut. Ada perbedaan pandangan mengenai lokasi yang bisa dijadikan sebagai calon kawasan industri, namun Kaesong terpilih sebagai situs pada akhirnya. Alasan utama dari kesepakatan ini adalah pertama, Korea Utara telah menderita selama sekitar 10 tahun sejak tahun 1990-an karena krisis. Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Utara terus menurun dari tahun 1990 sampai 1998. Oleh karena itu, Korea Utara mencoba memulihkan ekonominya dengan mengandalkan konstruksi *power country*.⁸ Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il, sangat mendukung pemulihan ekonominya.

⁸ Seok, Y. (2007). An Economic Perspective of Kaesong Industrial Complex in North Korea. *American Journal of Applied Sciences* 4, 938-945.

Alasan kedua karena pemerintah Korea Selatan, Kim Dae Jung, yang secara konsisten mendukung kesepakatan damai dan mengejar perdamaian di Semenanjung Korea serta. Korea Utara juga menyadari bahwa meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan dan memperluas kerja sama ekonomi sangat penting untuk mengatasi krisis ekonomi di bawah *Sunshine Policy* yang dibentuk oleh Kim Dae Jung. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai KIC didasarkan pada pengakuan realistis.

2. Penutupan KIC

Peresmian Presiden Park Geun Hye terjadi pada masa ketegangan tinggi di Semenanjung Korea. Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketiganya pada bulan Februari 2013 dan menanggapi dengan kuat ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan mulai melakukan latihan militer bersama pada bulan berikutnya. Selama beberapa minggu, Korea Utara menyatakan bahwa Perjanjian Gencatan Senjata dibatalkan, memutuskan hubungan terakhir militer antar-Korea, dan menyatakan perang dengan Korea Selatan. Korea Utara juga menarik 53.000 pekerja dari KIC atau Kawasan Industri Kaesong agar Korea Selatan juga menarik personilnya dari KIC secara bergantian.⁹

Selama beberapa bulan ke depan, kedua Korea secara berangsur-angsur kembali melakukan dialog dan berusaha untuk membuka KIC kembali, serta mengatasi masalah lain seperti reuni keluarga. Kedua belah pihak mencapai terobosan pada bulan Agustus 2013, menyetujui sejumlah langkah yang ditujukan untuk mencegah gangguan pada KIC selama krisis di masa depan dan mengambil langkah untuk mengembangkannya lebih lanjut. Hal ini termasuk

⁹ Daniel, W., Op.cit., hlm. 5

jaminan untuk tidak membatasi akses karyawan atau menarik pekerja secara sepihak. Selain itu juga memulai kembali komunikasi dan pembentukan komite bersama antara Utara dan Selatan untuk mengawasi KIC, dan janji untuk melakukan upaya bersama untuk menarik investasi di KIC dari luar negeri

Kemudian pada bulan Agustus 2015, dua tentara Korea Selatan yang berpatroli di DMZ terluka parah oleh ranjau darat yang ditempatkan di luar pos penjagaan mereka. Sebuah penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa ranjau tersebut sengaja ditanam di sana oleh tentara Korea Utara. Hal ini menjadi sebuah tuduhan yang ditolak oleh Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan merespon dengan melanjutkan propaganda pengeras suaranya di sepanjang perbatasan yang telah sepakat untuk hentikan pada 2004 oleh kedua belah pihak. Korea Utara menembakkan empat meriam ke Korea Selatan sebagai tanggapan atas ini, sementara Korea Selatan menanggapi dengan rentetan tembakan artileri¹⁰. Perundingan tingkat tinggi berikutnya menghasilkan kompromi bahwa Korea Utara menyatakan "menyesal" atas cedera yang menimpa Korea Selatan. Korea Selatan setuju untuk mengakhiri propagandanya "kecuali terjadi insiden yang tidak biasa."

Namun, pada tanggal 10 Februari 2016, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya menutup KIC. Presiden Park Geun Hye mengaitkan penutupan tersebut dengan uji coba nuklir keempat Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan peluncuran satelit yang melanggar resolusi

¹⁰ Daniel, W. (2017). Inter-Korean Relations. *The National Committee on North Korea*, 1-13.

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Februari, yang menyatakan bahwa Pyongyang telah "memanfaatkan secara salah" pendapatan dari KIC untuk meng-upgrade senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Dalam sebuah pidato di Majelis Nasional, Park Geun Hye berpendapat bahwa dana dari KIC telah sampai pada kepemimpinan Partai Pekerja Korea Utara dan keamanan pekerja Korea Selatan di KIC berada dalam risiko konstan. Presiden Park menambahkan bahwa tidak dapat disangkal jelas bahwa pendekatan dan niat baik yang ada sama sekali tidak akan bekerja dalam melawan tekad rezim Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir.¹¹

Selain KIC ditutup, pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana untuk memperketat sanksi di Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan menggunakan segala cara, termasuk sanksi dan dialog, untuk denuklirisasi Korea Utara. Park Geun Hye dengan tegas menanggapi provokasi nuklir dan rudal Korea Utara sekaligus secara konsisten mengejar proyek pertukaran dan kerjasama politik dan nonpolitik dengan memisahkannya dari situasi politik dan militer dalam kerangka kerja komunitas internasional Korea Utara.

Seorang pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa pembukaan kembali KIC bisa saja terjadi apabila Korea Utara dapat menghilangkan kekhawatiran tentang program nuklir dan misilnya. Sebagai tanggapan atas langkah Korea Selatan, Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai di Korea mengumumkan bahwa Korea Utara mengusir lebih dari 100 pekerja Korea Selatan yang tetap di KIC, membekukan semua aset di kawasan, memutuskan dua jalur militer antar Korea, dan memulihkan kontrol militer atas zona KIC. Korea

¹¹ Ibid.

Utara juga mengancam akan ada "konsekuensi" selanjutnya.¹²

Penutupan KIC tersebut bisa dikatakan sungguh disayangkan karena pendirian KIC pada masa pemerintahan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung ini dimaksudkan agar Korea Selatan dan Korea Utara bisa memperbaiki hubungan dengan melakukan kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. KIC juga merupakan tonggak penting dan kemajuan yang besar dalam mewujudkan reunifikasi selama berlangsungnya kebijakan sinar matahari Kim Dae Jung (*Sunshine Policy*), terutama reunifikasi secara damai yang dimulai dari kerjasama. Selain memberikan harapan kerjasama yang baik, Kaesong juga berkembang menjadi faktor untuk mencegah terjadinya perang di Semenanjung Korea.

Meskipun Presiden Park pada umumnya telah menanggapi tindakan provokatif Korea Utara dengan keras, keputusannya untuk menutup KIC mengejutkan banyak pengamat Korea. Padahal KIC tetap beroperasi pada tahun 2010 meskipun ada dua serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Setelah insiden pertama, Korea Selatan memutuskan semua hubungan ekonomi dengan Korea Utara kecuali kompleks Kaesong, meninggalkan KIC sebagai satu-satunya sisa kerjasama antar-Korea yang telah tumbuh sejak tahun 2000.

Hingga awal 2016, KIC pada umumnya telah menerima dukungan dari seluruh spektrum politik Korea Selatan karena sejumlah alasan selain simbolisme kerja sama Utara-Selatan. Pertama, banyak orang Korea Selatan melihat kawasan ini sebagai tempat berpijak yang potensial untuk

¹² Mark, E. M. (2016). The Shutdown of the Joint North/South Korean Kaesong Industrial Complex. *CRS Insight*.

reformasi pasar di Korea Utara. Mereka juga berharap akan mengurangi biaya potensial dari reunifikasi Korea yang akhirnya terjadi. Kedua, KIC menyediakan perusahaan Korea Selatan dengan satu-satunya akses langsung mereka ke ekonomi Korea Utara, memberikan harapan pada Korea Utara yang memiliki upah relative. Pekerja Korea dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi Korea Selatan. Ketiga, banyak warga Korea Selatan khawatir tentang ketergantungan ekonomi Korea Utara terhadap Tiongkok yang menyumbang sekitar 70% dari total perdagangan Korea Utara dan sejauh ini merupakan sumber investasi asing terbesar di Korea Utara.¹³ Keempat, beberapa warga Korea Selatan berpendapat bahwa KIC umumnya telah bertindak sebagai kekuatan penangkal perilaku Pyongyang terhadap Seoul. Partai oposisi utama Korea Selatan mengkritik keputusan penutupan, dilaporkan dengan alasan bahwa hal itu bisa menciptakan ketidakstabilan di Semenanjung Korea.

Perubahan kebijakan Korea Selatan tersebut menyebabkan pergeseran dalam kebijakan keamanan, diplomasi, dan pendekatan terhadap hak asasi manusia Korea Utara. Setelah diadopsinya resolusi sanksi baru dari PBB yang diadopsi sebagai tanggapan atas uji coba nuklir keempat Korea Utara, Presiden Park melakukan perjalanan ke negara-negara di mana Korea Utara memiliki hubungan militer, termasuk Iran, Uganda, dan Ethiopia untuk meyakinkan negara-negara tersebut agar bekerja sama dengan sanksi tersebut.

¹³ Ibid.

C. Bantuan Korea Selatan ke Korea Utara

Provokasi nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara membuat pemerintah Korea Selatan menanggukhkan sementara proyek pertukaran, kerjasama, maupun bantuan-bantuannya untuk menekan Korea Utara dalam denuklirisasi. Termasuk langkah untuk menutup total KIC dan menjatuhkan sanksi pada Korea Utara dalam kerjasama, baik dengan Korea Selatan itu sendiri atau dengan masyarakat internasional. Sejak itu, pemerintah telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menderita kerugian penutupan KIC. Penanggukan kerjasama dan bantuan yang dilakukan tentu berdampak pada hubungan kedua Korea. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perwujudan reunifikasi.

Berikut ini adalah data yang menunjukkan perdagangan dan kerjasama yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dari tahun 1989 sampai tahun 2016.

Tabel 3.1. Volume Perdagangan Antar-Korea

(USD millions)

Year	'89-02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	Total
Inbound	2,066	289	258	340	520	765	932	934	1,044	914	1,074	615	1,206	1,452	166	12,596
Outbound	1,505	435	429	715	830	1,033	888	745	868	800	897	521	1,136	1,262	147	12,222
Total	3,571	724	687	1,056	1,350	1,798	1,820	1,679	1,912	1,714	1,971	1,136	2,343	2,714	333	24,818

Sumber: (Unification M. o., Inter-Korean Exchanges & Cooperation)

Tabel 3.2. Persetujuan Proyek Kerjasama Antar-Korea

(number of cases)

Category		'91-'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'14	'12	'13	'14	'15	'16	Total	
Economy	Economic	16	1	2	6	10	4	6	9	1	19	-	-	19	-	-	-	95	
	KIC	Approval	-	-	-	17	26	15	163	53	10	6	1	6	5	3	3	-	308
		Report	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	18	22	10	2	7	-	82
Society and culture		23	7	13	16	47	26	19	3	-	1	1	-	-	1	2	-	159	
Total		39	8	15	39	83	45	188	65	23	37	20	28	34	6	12	-	642	

Sumber: (Unification M. o., Inter-Korean Exchanges & Cooperation)

Jika dilihat dari data tersebut, pada tahun 2014 memang terjadi kenaikan jumlah perdagangan, bahkan bisa dikatakan sebagai pencapaian tertinggi disbanding tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya. Nilai perdagangan antar-Korea mencapai US \$ 2,343 miliar, naik 106,2 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan dalam perdagangan antar-Korea terutama dihasilkan dari peningkatan pertukaran di KIC bahkan ketika Seoul telah menjatuhkan sanksi hukuman yang melarang pertukaran ekonomi dengan Korea Utara sejak 2010 menyusul tenggelamnya kapal perang Korea Selatan.

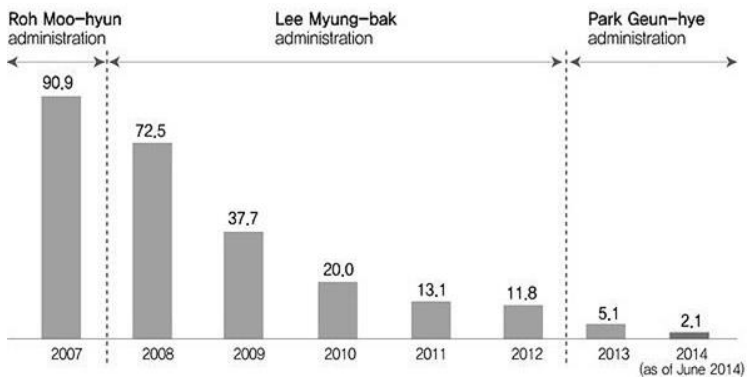
Namun, volume perdagangan antar-Korea mencapai titik terendah pada tahun 2016 ketika Korea Selatan menutup KIC. Nilai perdagangan antar-Korea mencapai US \$ 333 juta tahun, dibandingkan dengan \$ 2,714 miliar pada tahun sebelumnya. Sebagian besar perdagangan antar-Korea di tahun 2016 tercatat sebelum tanggal 10 Februari 2016, ketika Seoul menutup KIC di kota perbatasan Korea Utara setelah uji coba nuklir yang dilakukan oleh Pyongyang dan peluncuran roket jarak jauh.

Begitu juga dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh kedua Korea di masa Pemerintahan Park Geun Hye mengalami penurunan, terutama di bidang ekonomi. Meskipun sempat mencapai angka yang tinggi

di tahun 2013, tetapi di tahun 2016 sama sekali tidak ada proyek kerjasama yang terjalin. Penutupan KIC menjadi sebuah ‘tanda’ berakhirnya kerjasama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara, terlebih dalam sektor ekonomi. Mengingat perilaku sebelumnya dan ambisi nuklir yang mencolok dari Korea Utara membuat Korea Selatan berusaha mengantisipasi kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Maka, Park Geun Hye bersikeras untuk melakukan proyek isolasi lintas batas dengan Korea Utara.

Selain data perdagangan dan kerjasama antar-Korea di atas, terdapat juga data bantuan-bantuan di sektor swasta yang dilakukan oleh Korea Selatan ke Korea Utara. Berikut adalah data bantuan sektor swasta Korea Selatan ke Korea Utara yang mengalami penurunan pada periode pemerintahan Park Geun Hye.

Tabel 3.3. Bantuan Swasta ke Korea Utara



Sumber: (North, 2014)

Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan pertukaran sektor swasta untuk memperingati Deklarasi Bersama tanggal 15 Juni dari pertemuan antar-Korea tahun 2000 antara Presiden Kim Dae Jung dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Pada tahun-tahun setelah

deklarasi, kedua negara telah mengadakan dialog bersama. Namun, di tahun-tahun setelahnya, kelompok-kelompok sipil yang terkait dengan reunifikasi merasa tidak puas dan mulai mempertanyakan. Terutama keluhan tentang kepemimpinan Presiden Park Geun Hye yang telah membangun harapan dengan ceramahnya pada awal tahun tentang reunifikasi menjadi "jackpot," tetapi sejauh ini tidak ada yang terealisasi darinya.¹⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa situasinya bahkan lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya yang mengalami penurunan sepanjang waktu di bawah pemerintahan Lee dalam hal tingkat bantuan di sektor swasta. Menurut White Paper tahunan tentang reunifikasi yang diterbitkan pada bulan Maret, jumlah total bantuan swasta untuk Korea Utara yang disahkan oleh Kementerian Reunifikasi pada tahun 2013 mencapai 5,1 miliar won (US \$ 5 juta). Jumlah ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 90,9 miliar won (US \$ 89,3 juta) yang disetujui pada tahun 2007 pada pemerintahan Roh Moo Hyun, tetapi hanya seperenam dari rata-rata tahunan sebesar 31,0 miliar won (\$ 30,5 juta) selama pemerintahan Presiden Lee.

Pada tahun 2013, seorang pejabat kementerian senior Korea Utara yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa tidak ada bantuan nyata ke Korea Utara hingga Agustus karena semua hubungan telah diputus setelah uji coba nuklir ketiga Korea Utara pada bulan Februari. Jumlah bantuan dan jumlah orang yang terlibat dalam pertukaran jatuh karena ada kekosongan enam bulan.¹⁵

¹⁴ Hankyoreh. (2014, Juni 16). *Park's private sector aid to North Korea falls to all time low*. Retrieved Maret 22, 2018, from hani.co.kr:

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/642563.html

¹⁵ Ibid.

Selain itu, terdapat data yang menunjukkan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Jumlah total bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sebesar 3,2871 trilyun KRW (USD 3,04695 milyar) dari tahun 1996 sampai akhir 2017.¹⁶ Namun, data berikut hanya menyorot perkembangan bantuan yang diberikan di tahun 2005 sampai tahun 2016 agar bisa menyorot jumlah bantuan di tahun-tahun pemerintahan Park Geun Hye.

Tabel 3.4. Bantuan Kemanusiaan ke Korea Utara

Year	Government assistance						NGO assistance	Total	The Special Account for Grain Management
	Free aid				Food loans	Total			
	by govern ment	through NGOs	through International organizations	Total					
'05	1,221	120	19	1,360	1,787	3,147	780	3,926	(6,726)
'06	2,000	133	139	2,273		2,273	709	2,982	(1,522)
'07	1,432	216	335	1,983	1,505	3,488	909	4,397	(2,252)
'08		241	197	438		438	725	1,164	
'09		77	217	294		294	377	671	
'10	183	21		204		204	201	405	(45)
'11			65	65		65	131	196	
'12			23	23		23	118	141	
'13			133	133		133	51	183	
'14			141	141		141	54	195	
'15		23	117	140		140	114	254	
'16		1		1		1	28	29	

Sumber: (Unification M. o.)

Data tersebut menunjukkan bahwa sama seperti halnya perdagangan dan kerjasama yang dilakukan oleh kedua Korea, bantuan kemanusiaan juga mengalami

¹⁶ Ministry, O. U. (n.d.). Humanitarian Cooperation. Retrieved Maret 22, 2018, from Ministry of Unification:

http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/humanitarian/

penurunan yang sangat drastis di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanapun Korea Utara mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dengan membuat ancaman militer, termasuk uji coba nuklir keempatnya. Korea Selatan bersama komunitas internasional mengambil sanksi keras terhadap Utara, termasuk penghentian kerjasama dan pengurangan bantuan. Untuk melihat hubungan kedua Korea secara umum, berikut data dialog yang dilakukan:

Table 3.5. Dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara

Category	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	Total
Politics	209	4	5	2	10	5	13	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	2	256
Military	6	9	6	5	3	4	11	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	49
Economy	12	14	17	13	11	8	22	3	4	3	-	-	22	3	1	-	-	-	133
Humanitarian issues	122	3	7	2	4	3	3	-	2	4	-	-	1	1	1	-	-	-	153
Society and Culture	34	2	1	1	6	3	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	58
Total	383	32	36	23	34	23	55	6	6	8	1	-	24	8	5	-	-	5	649

Sumber: (Unification M. o., Inter-Korean Dialogue)

Data tersebut menunjukkan bahwa dialog yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara memang sempat menurun di tahun-tahun pemerintahan presiden Lee Myung Bak di tahun 2008 sampai tahun 2012 karena kebijakan konfrontasi yang dilakukan. Pada masa awal kepemimpinan Park Geun Hye di tahun 2013, dialog-dialog sebagai upaya pendekatan dengan Korea Utara masih dilakukan. Namun, seiring dengan sikap keras Park Geun Hye terhadap Korea Utara, dialog-dialog mulai jarang dilakukan.

Bahkan Korea Selatan menolak proposal Korea Utara untuk dialog antar-Korea pada bulan Mei 2016 dan kembali menegaskan pendiriannya bahwa langkah denuklirisasi harus menjadi "prioritas utama" dalam

melanjutkan pembicaraan. Proposal tersebut berisi tentang usulan untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja dengan Korea Selatan pada akhir Mei atau awal Juni 2016 untuk persiapan pembicaraan militer.

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada perubahan posisi dari pemerintah Korea Selatan bahwa denuklirisasi Korea Utara harus menjadi prioritas utama dalam hal dialog dengan Korea Utara. Kementerian mengatakan menerima pesan yang dikirim oleh Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat Utara dengan isi yang sama. Korea Utara harus menunjukkan tekadnya untuk denuklirisasi terlebih dahulu jika benar-benar menginginkan perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea.¹⁷

Pemerintah Korea Selatan bahkan sempat mengecam proposal itu sebagai ketulusan yang kurang dan menyebutnya sebagai taktik propaganda. Terkait dengan dialog dialog terbaru Korea Utara, juru bicara kementerian luar negeri Cho Jun Hyuk mengatakan Seoul akan tetap pada sikap tegasnya mengenai denuklirisasi. Jika Korea Utara benar-benar menginginkan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, Korea Utara harus menahan diri dari ancaman dan provokasi, sambil menunjukkan kemauannya yang kuat untuk denuklirisasi. Korea Selatan berpendapat bahwa isolasi akan merugikan diri sendiri, dalam artian Korea Utara. Satu-satunya jalan keluarnya adalah dengan menunjukkan ketulusann Korea Utara pada denuklirisasi melalui tindakan nyata.¹⁸

¹⁷ Kokobj. (2016, Mei 24). N.K. NEWS. Retrieved Maret 22, 2018, from Yonhap News Agency: <http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/05/24/0401000000AEN20160524009652315.html>

¹⁸ Ibid.